
MODEL GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Siti Rofingatun

sitiro@yahoo.co.id

Bill Pangayow

billpangayow@gmail.com

Rudiawie Larasati

ademaularasati@yahoo.co.id*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih***ABSTRAK**

Tata kelola keuangan kampung yang baik dapat menjamin dilaksanakannya pengelolaan keuangan kampung yang baik dari sisi transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran. Model Good Governance keuangan kampung perbatasan diperlukan dalam integrasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan kampung. Tujuan penelitian ini adalah pemodelan Good Governance keuangan kampung perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea serta penerapannya pada empat kampung perbatasan. Responden penelitian terdiri dari pakar akuntansi sektor public yang disebut informan untuk membuat model Good Governance dan responden aparat kampung dan masyarakat pada empat kampung untuk menentukan kualitas penerapan *Good Governance*. Alat analisis yang digunakan adalah *Analytic Hierarchy Process*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sub faktor penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang ditetapkan yang merupakan faktor dari disiplin anggaran sangat penting bagi pengelolaan keuangan kampung. Selain itu, penjelasan kepada masyarakat mengenai keuangan kampung yang merupakan bagian dari akuntabilitas merupakan sub faktor penting berikutnya diikuti dengan keterbukaan di bidang keuangan, sistem dan prosedur pengeluaran dan penerimaan kas yang merupakan faktor transparan.

Kata Kunci: Good Governance; Daerah Perbatasan; AHP; Keuangan Kampung

ABSTRACT

The Good Governance Model for border village finance is needed in the integration of policies in village financial management. The purpose of this study is to model the financial good governance of border villages of the Republic of Indonesia and Papua New Guinea and their application in four border villages. Research respondents consisted of public sector accounting experts called informants to create a model of Good Governance and respondents of village officials and the community in four villages to determine the quality of the implementation of Good Governance. The analytical tool used is the Analytic Hierarchy Process. The results showed that the use of funds in accordance with the established budget which is very important for village financial management. In addition, an explanation to the community about village finances is the next important sub factor followed by openness in the financial sector, the system and procedure.

Keywords: Good governance; Border villages; AHP; Villages funds

1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang dimulai dari kampung merupakan program pemerintah yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir. Kampung adalah unit pemerintahan dalam masyarakat terkecil yang dapat memajukan suatu negara. Diharapkan, dengan terbangunnya pembangunan yang baik di kampung, maka akan meningkatkan kualitas pembangunan daerah di atasnya. Oleh sebab itu, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa untuk dapat memayungi pembangunan mulai dari kampung.

Pembangunan kampung perbatasan memiliki karakteristik yang berbeda dengan kampung lainnya. Area perbatasan adalah satu daerah yang dibagi dengan dua atau lebih peraturan politik (Guo, 2004). Area ini memiliki berbagai fungsi yang kompleks yang disebabkan oleh aturan yang ada dari beberapa Negara. Hal ini menyebabkan pembangunan yang dilakukan di daerah perbatasan memiliki

karakteristik tersendiri. Falah et al. (2018) menemukan bahwa variabel pelayanan kesehatan dan aksesibilitas informasi menjadi faktor utama dalam pembangunan kampung perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa infrastruktur kampung menjadi variabel yang penting untuk diperhatikan (Sutikno dan Suliswanto, 2018). Dengan aksesibilitas yang sulit, dapat memperlambat pertanggungjawaban keuangan di kampung perbatasan.

Tata kelola pemerintahan baik yang tinggi akan menjamin terlaksananya pembangunan kampung yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan asas pengelolaan yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, diharapkan pengelolaan keuangan kampung memenuhi standar *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik). Penelitian perlu dilakukan untuk mengidentifikasi subfaktor-subfaktor apa dalam transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran yang memiliki peran penting dalam *Good Governance* pengelolaan keuangan kampung. Penerapan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) perlu dilakukan untuk menilai sub faktor yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan kampung.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka perlu dilakukan identifikasi indikator Akuntabilitas, Transparansi, Partisipatif dan Tertib dan Disiplin Anggaran yang merupakan bagian dari *Good Governance* di kampung, khususnya kampung perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Selain itu, penelitian ini juga menguji penerapan *Good Governance* dalam keuangan kampung pada empat kampung perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea.

2. THEORETICAL REVIEW

2.1 Sistem Akuntansi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Halim dan Kusufi 2012, menjelaskan yang dimaksud akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan.

Tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah: a) Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban mengandung arti yang lebih luas dari pada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya. b) Manajerial, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Tujuan ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintah tingkat atas dan menengah dapat menjadikan informasi keuangan atas pelaksanaan yang lalu untuk membuat keputusan ataupun penyusunan perencanaan untuk masa yang akan datang, c) Pengawasan, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir atau dokumen merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

2.2 Pengelolaan Keuangan Kampung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, keterampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa yang di maksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sedangkan yang di maksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat 2 dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

2.3 Pengelolaan Keuangan Kampung di Provinsi Papua

Provinsi Papua memulai pembangunan dari kampung dengan menggulirkan Program Pemberdayaan Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) pada tahun 2007 dengan dukungan dana sebesar Rp. 100.000.000,- per kampung. Penyaluran dana pembangunan dari kampung telah berkembang pada saat ini. Keuangan kampung didukung dengan tiga sumber dana utama yaitu dari Pemerintah Pusat dengan sebutan Dana Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan adanya ketiga dukungan dana tersebut, diharapkan pemerintah kampung dapat bangkit untuk membangun sesuai dengan kebutuhan masing-masing kampung. Besarnya dana yang diturunkan kepada pemerintah kampung membutuhkan perhatian dari aparat dalam pengelolaan dana tersebut.

Keuangan kampung perlu dikelola dengan baik oleh aparat kampung agar dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kampung. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 dan diperbarui dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh aparat kampung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran sangat penting dalam pengelolaan keuangan kampung (Wahyuningsih dan Kiswanto, 2016; Savitri et al, 2018; Tulis et al, 2018). Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian Kurniawati dan Pangayow (2017), yang dilakukan pada Kabupaten Jayapura menunjukkan pengelolaan keuangan kampung belum dapat mensejahterakan masyarakat kampung. Penelitian ini mengambil responden masyarakat sebagai sampel penelitian. Dalam penelitian lainnya, Ramly et al, (2018) menemukan bahwa alokasi dana kampung belum dapat meningkatkan potensi sumber daya kampung. Pada penelitian di Kabupaten Jayapura, Rasmi et al. (2018) menemukan bahwa Sistem akuntansi dan Pertanggungjawaban kepada kampung belum dapat meningkatkan pengelolaan keuangan kampung. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dirangkum bahwa pertanggungjawaban keuangan kampung belum dianggap cukup oleh responden dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Kiswanto et al, (2017) menemukan bahwa efektivitas pengendalian internal dan ketaatan

regulasi akuntansi berpengaruh dalam menurunkan kecenderungan kecurangan. Dalam penelitian lainnya yang dilakukan di Kabupaten Biak, Wonar et al. (2018) menemukan bahwa Kompetensi aparatur kampung dan Ketaatan pelaporan keuangan dapat meningkatkan Pencegahan kecurangan. Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menemukan bahwa implementasi pengelolaan keuangan kampung terkendala dengan kurangnya sumber daya manusia pengelola keuangan (Azlina et al, 2017; Simangunsong dan Wicaksono, 2017; Kurniawan dan Firmansyah, 2018; Savitri et al, 2018).

Hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, terdapat perbedaan kualitas laporan keuangan dari aparat pengelola keuangan kampung dan masyarakat kampung (Pangayow, 2017). Pada penelitian lainnya, pengelolaan keuangan kampung belum dapat mensejahterakan masyarakat kampung dinilai dari respon masyarakat (Kurniawati dan Pangayow, 2017). Penelitian yang meneliti indikator pembangunan kampung perbatasan menunjukkan bahwa variabel pelayanan kesehatan dan aksesibilitas informasi menjadi faktor utama dalam pembangunan daerah perbatasan (Falah, Marlissa, Pangayow dan Ghozali, 2018). Penelitian lainnya menunjukkan Sistem akuntansi dan Pertanggungjawaban kepada desa belum meningkatkan variabel pengelolaan keuangan desa (Rasmi, Salle dan Pangayow, 2018). Bila ditinjau dari Pencegahan kecurangan, terdapat variabel Kompetensi aparatur dan Ketaatan pelaporan keuangan yang dapat meningkatkan Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan kampung (Wonar, Falah dan Pangayow, 2018).

2.4 Kerangka Teoritis

Berdasarkan literatur revidi di atas, maka dapat dibuat sebuah kerangka pemikiran teoritis seperti di bawah ini:

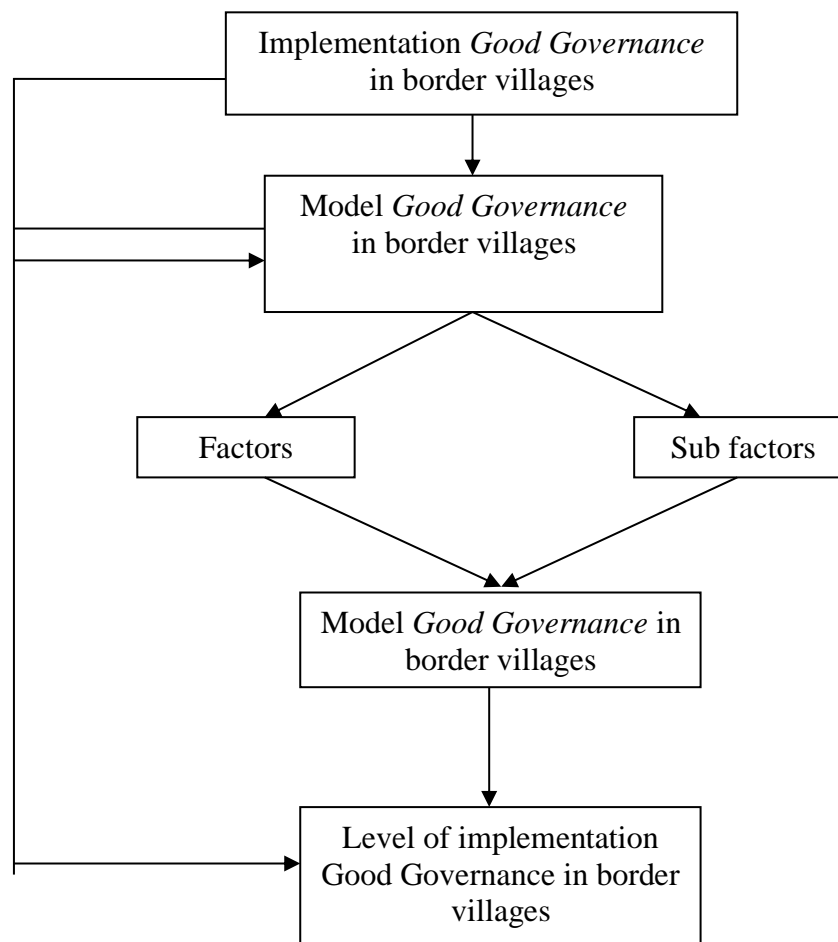


Figure 1. Theoretical Framework

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris (*empirical design*). Studi ini meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini. Penelitian ini dilakukan pada beberapa kampung di daerah perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea pada tahun 2019.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah kampung yang berada di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Indonesia. Pada penelitian ini sampel ditentukan dengan metode *judgment* yaitu empat kampung yang berada di daerah perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Keempat kampung tersebut adalah kampung Skouw Mabo, Skouw Yambe, Skouw Sae dan Mosso. Responden dalam penelitian ini terbagi dua yaitu responden yang akan menentukan Model *Good Governance* yang selanjutnya disebut informan dan responden yang akan menentukan penerapan *Good Governance* di empat kampung.

Informan dalam penelitian ini menentukan Model *Good Governance* di kampung perbatasan dan dipilih secara *purposive* berdasarkan tingkat kepakaran dalam pengelolaan keuangan kampung di daerah perbatasan. Informan yang dipilih adalah dosen pakar bidang akuntansi sektor public pada Universitas Cenderawasih. Responden dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan kampung dan masyarakat yang turut serta dalam musyawarah kampung pada empat kampung perbatasan. Responden penelitian ini yaitu: Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kaur keuangan, Kaur tata usaha dan umum, Kaur perencanaan, Kasi pemerintahan, Kasi kesejahteraan, Kasi pelayanan, Badan Permusyawaratan Kampung, Tokoh agama dan Tokoh masyarakat,

3.3 Sumber Data

Sumber penelitian ini menggunakan data Primer. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengumpulan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Bentuk kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada contoh kuesioner dalam Saaty, 2008. Sedangkan item-item yang dibandingkan dalam kuesioner adalah aspek atau prinsip dari *Good Governance*.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran

Faktor-faktor yang menjadi variabel dalam penelitian ini diambil berdasarkan pada Pasal 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pasal tersebut disampaikan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Definisi dari masing-masing faktor diambil dari Penjelasan Pasal 24 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sub faktor dalam penelitian ini dikembangkan dari definisi yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 24, Undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Transparan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub faktor dari transparan adalah: 1) dilakukannya sosialisasi rencana kegiatan kampung; 2) keterbukaan di bidang keuangan, sistem dan prosedur pengeluaran dan penerimaan kas, dan sistem pelaporan; dan 3) pendokumentasian kebijakan kampung dan penyampaian kepada internal dan eksternal kampung.

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub faktor dari akuntabilitas adalah: 1) adanya uraian tugas setiap aparat kampung; 2) Adanya penjelasan kepada masyarakat mengenai proses kegiatan kampung; 3) Adanya penjelasan kepada masyarakat mengenai keuangan kampung.

Partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan Kelembagaan Desa dan Unsur Masyarakat Desa. Sub faktor dari partisipatif adalah: 1) melibatkan masyarakat dalam

proses perencanaan kegiatan kampung; 2) melibatkan Badan Permusyawaratan Kampung dalam proses penyusunan anggaran, 3) melibatkan masyarakat dalam rapat pertanggungjawaban kegiatan kampung.

Disiplin Anggaran adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa. Disiplin anggaran terdiri dari: 1) penetapan anggaran sesuai dengan waktu yang ditentukan; 2) penetapan pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan 3) penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang ditetapkan

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Perhitungan bisa dilakukan secara manual menggunakan *Microsoft excel* maupun dengan bantuan *software expert choice*. Langkah-langkah dalam pemilihan aspek prioritas GG adalah sebagai berikut:

1. Menyusun struktur hirarki masalah Dalam metode AHP, kriteria biasanya disusun dalam bentuk hirarki. Kriteria dan subkriteria dalam penelitian ini merupakan kriteria dan subkriteria yang dipakai dalam implementasi *Good Governance*. pemilihan Aspek prioritas pada implementasi GG disusun dalam tiga level hirarki. Level 0 merupakan tujuan, level pertama merupakan kriteria (aspek), level 2 merupakan subkriteria.
2. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan kriteria yang setingkat di atasnya.
3. Menghitung bobot/prioritas dari masing-masing variabel pada level 1 (kriteria) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran Menghitung bobot/prioritas dari masing-masing variabel pada level 2 (subkriteria) dari masing-masing kriteria dalam pemilihan supplier seperti langkah 3 di atas. Kemudian ditentukan *global priority*/prioritas global dengan cara mengalikan *local priority*/prioritas dari masing-masing subkriteria dengan prioritas kriteria.
4. Menghitung bobot/prioritas dari masing-masing variabel pada level 3 (alternatif) yaitu bobot setiap PT dibandingkan dengan masing-masing subkriteria seperti langkah 3 di atas.
5. Setelah mengetahui bobot dari masing-masing subkriteria dan bobot dari masing-masing Aspek kemudian ditentukan kampung yang akan dipilih. Nilai keseluruhan dari masing-masing Aspek yaitu jumlah keseluruhan dari perkalian bobot Aspek GG dengan bobot subkriteria. Aspek yang dipilih adalah Aspek GG yang memiliki nilai paling tinggi atau yang prioritas.

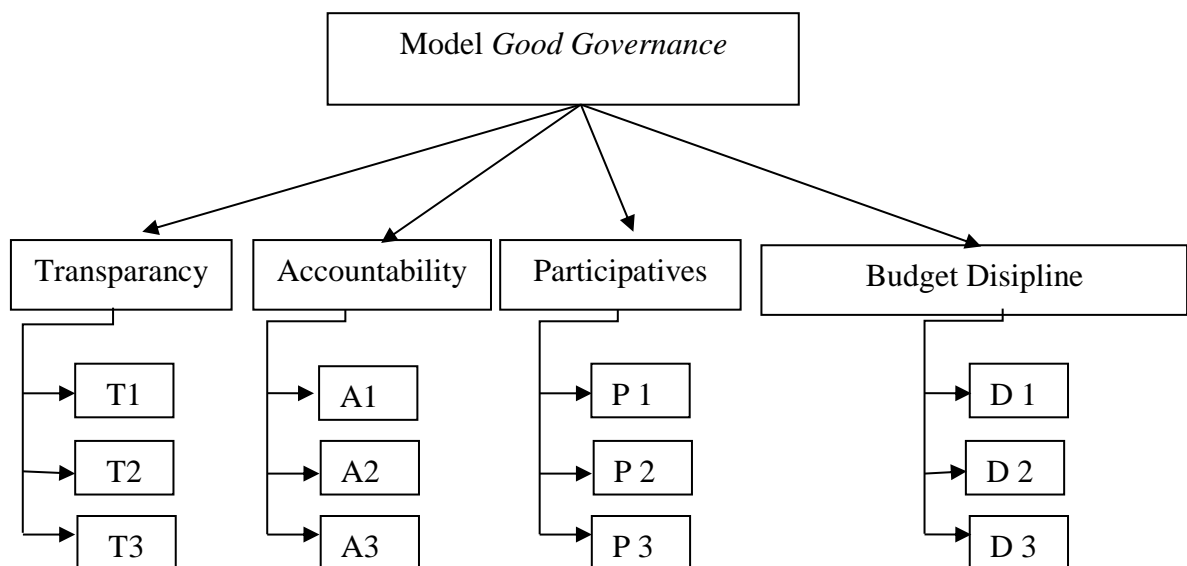


Figure 2. Model Good Governance in Border Villages

4. HASIL

4.1 Model Good Governance

Bila dibandingkan berdasarkan faktor yang ada, nampak bahwa faktor disiplin memiliki peranan penting dalam pelaksanaan Good Governance untuk daerah perbatasan yaitu sebesar 0.466 (figure 3). Selanjutnya faktor yang penting dalam Good Governance yaitu Akuntabilitas sebesar 0.227. Faktor transparansi menjadi elemen ketiga dengan nilai 0.193 diikuti dengan partisipatif dengan nilai 0.114.

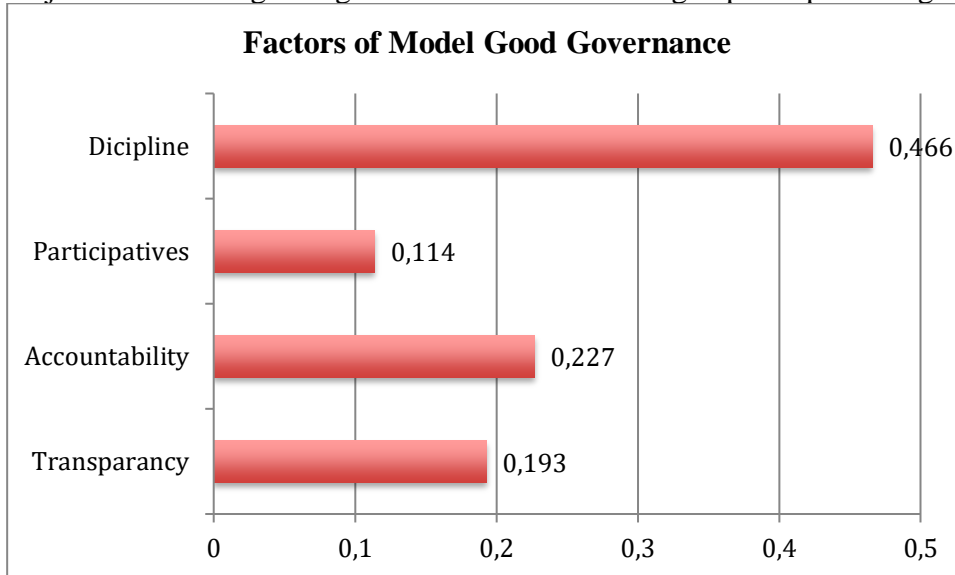


Figure 3. Level of Factors

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Model Good Governance, jika ditinjau secara terpisah, nampak pada transparansi, sub faktor kedua yaitu keterbukaan di bidang keuangan, sistem dan prosedur pengeluaran dan penerimaan kas memiliki nilai dominan yaitu 0.648 dibandingkan dengan sub faktor lainnya (figure 4). Pada akuntabilitas, sub faktor adanya penjelasan kepada masyarakat mengenai keuangan kampung memiliki nilai yang tinggi yaitu 0.466 dibandingkan dengan sub faktor lainnya. Pada faktor partisipatif, sub faktor melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan kampung memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu 0.431 dibandingkan dengan sub faktor lainnya. Faktor Disiplin, sub faktor penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang ditetapkan memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu 0.579 dibandingkan dengan sub faktor lainnya.

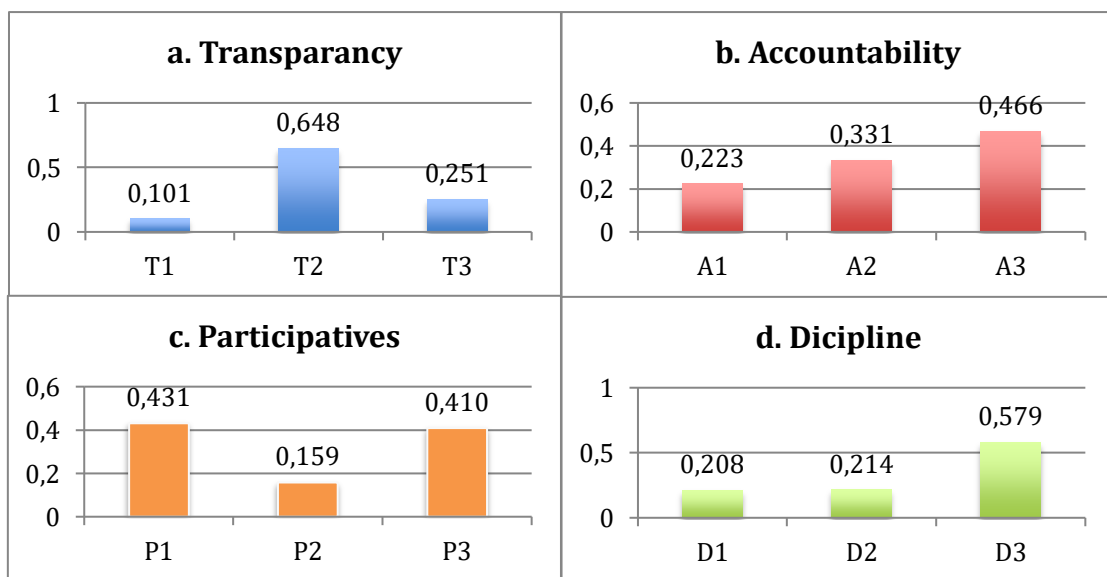


Figure 4. Level of Sub Factor To The Factors Above

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Good Governance untuk pengelolaan keuangan kampung perbatasan memiliki nilai yang tinggi pada sub faktor penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, yang berada pada faktor disiplin sebesar 0.251 (figure 5). Selanjutnya, sub faktor penting lainnya yaitu penjelasan kepada masyarakat mengenai proses kegiatan kampung, yang merupakan bagian dari faktor akuntabilitas sebesar 0.122. Sub faktor penting berikutnya yaitu keterbukaan di bidang keuangan, sistem dan prosedur pengeluaran dan penerimaan kas dan sistem pelaporan.

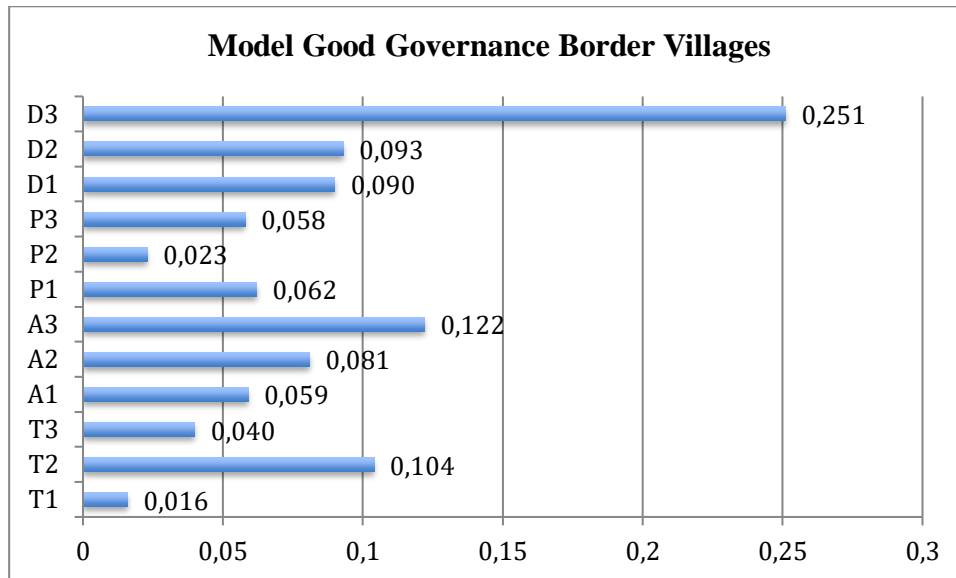


Figure 5. Model Good Governance Of Border Villages

Disiplin adalah faktor yang paling dominan dalam mewujudkan Good Governance pada desa perbatasan, khususnya pada sub faktor disiplin dalam penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Pada penyusunan perencanaan dan penganggaran kampung, keterlibatan seluruh pihak, baik masyarakat, perwakilan masyarakat dan aparat kampung, sangat penting untuk menyusun kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, disiplin penggunaan dana sesuai dengan anggaran menjadi perhatian dalam Good Governance. Hal ini berarti, bahwa aparat yang dipercayakan dalam mengelola dana, dapat menggunakan kepercayaan masyarakat dengan baik sesuai dengan anggaran yang disusun bersama. Ini juga berarti bahwa masyarakat mempercayai aparat untuk tidak melakukan fraud terhadap dana yang ada.

Faktor penting berikutnya adalah akuntabilitas, khususnya pada sub faktor penjelasan kepada masyarakat mengenai proses kegiatan kampung. Penjelasan kepada masyarakat dapat berupa penjelasan tertulis melalui papan pengumuman kampung, website kampung ataupun secara langsung melalui musyawarah kampung. Hal ini penting untuk dilakukan karena masyarakat membutuhkan informasi mengenai apakah kegiatan yang telah direncanakan bersama telah dilakukan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan masyarakat atau tidak. Bilamana belum dilaksanakan, apa penjelasan dari aparat kampung terhadap kegiatan yang belum dilaksanakan atau kendala apa saja yang dimiliki sehingga perlu dibicarakan bersama. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kegiatan dilaksanakan dan akan menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat. Setelah menimbulkan kepercayaan dengan baik, maka sub faktor yang penting berikutnya adalah keterbukaan di bidang keuangan, sistem dan prosedur pengeluaran dan penerimaan kas dan sistem pelaporan yang merupakan salah satu bagian dari faktor transparansi.

4.2 Implementation of Good Governance

Hasil penelitian mengenai penerapan Good Governance pada masing-masing kampung menunjukkan bahwa Kampung Skouw Sae memiliki penerapan Good Governance yang sangat baik dibandingkan dengan tiga kampung lainnya. Hal ini ditandai dengan nilai total penerapan yang tinggi yaitu 26.110.

Table 1. Criteria of Implementation Good Governance

KAMPUNG	T	A	P	D	TOTAL	CRITERIA
KAMPUNG SKOUW SAE	1.988	7.294	1.141	15.686	26.110	VERY GOOD
KAMPUNG SKOUW MABO	2.015	7.916	1.204	17.955	23.522	GOOD
KAMPUNG SKOUW MOSSO	1.677	6.513	1.035	12.028	21.254	GOOD
KAMPUNG SKOUW YAMBE	1.573	5.579	0.941	10.632	18.724	GOOD

5. KESIMPULAN

Good Governance pengelolaan keuangan kampung dapat terwujud bila seluruh elemen masyarakat kampung dapat memercayai aparat pengelola keuangan kampung dalam melaksanakan pembangunan kampung. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan sangat penting dalam mewujudkan Good Governance. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan akan kuat bilamana mereka merasa bahwa aparat pengelola keuangan telah disiplin dalam penggunaan dana kampung sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan bersama. Selain itu, penjelasan terhadap penggunaan dana terhadap masyarakat dalam proses pembangunan juga merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan. Selanjutnya, keterbukaan pada keuangan akhirnya menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban detail penggunaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azlina N, Hasan A, Desmiyawati, Muda I. 2017. The effectiveness of village fund management (Case study at villages in coastal areas in Riau). *International Journal of Economic Research*: 14(12)
- Falah S, Marlissa ER, Pangayow B, Ghozali I. 2018. Antecedent development of village borders: testing analysis of factors. *International Journal of Civil Engineering and Technology*: 9(8)
- Guo R. 2004. *Cross border resource management: Theory and Practice*. Amsterdam: Elsevier
- Jogiyanto H. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPF.
- Kiswanto, Mustikawati F, Puspitasari D, Murtini H, Gunawan DI. 2017. Perception of village financial managers of accounting fraud tendency. *International Conference on Studies in Business, Management, Education and Law*: 5th
- Kurniawan, Firmansyah I. 2018. Problem and solution of village accounting implementation using Analytic Network Process Approach. *International Journal of Management and Applied Science*: 4(5)
- Kurniawati Y, Pangayow B. 2017. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana kampung, kebijakan kampung dan kelembagaan kampung terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*: 12(2)
- Pangayow B. 2017. Gap Ekspektasi kualitas laporan keuangan kampung antara pengelola keuangan dan masyarakat di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*: 12(1)
- Ramly AR, Wahyuddin, Mursyida J, Mawardati. 2018. Implementation of village fund policy in improving economy of village society. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*: 6(3)
- Rasmi D, Salle A, Pangayow B. 2018. Analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kampung. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*: 13(1)
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa. Jakarta

Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta

Saaty TL. 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Services Sciences*: 1(1)

Savitri E, Gumanti TA, Diyanto AV. 2018. The effectiveness of allocated village funds management. *Journal of Applied Management*: 16(4)

Simangunsong F, Wicaksono S. 2017. Evaluation of village fund management in Yapen Islands Regency, Papua Province (Case study at Pasir Putih village, South Yapen District). *Open Journal of Social Science*: 10

Sutikno, Suliswanto MSW. 2018. Evaluation of village fund allocation contribution on village economic development and rural business growth in Indragiri Hilir Regency. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*: 2(1)

Tulis YG, Utami I, Hapsari ANS. 2018. Village fund management transparency: A lesson learned. *Journal of Accounting and Strategic Finance*: 1(2)

Wahyuningsih dan Kiswanto. 2016. Factors affecting the accountability of village financial management. *Accounting Analysis Journal*: 5(3)

Wonar K, Falah S, Pangayow B. 2018. Pengaruh kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dengan *moral sensitivity* sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*: 1(2)